

Perempuan dan Kebangsaan

Proklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima. Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007) mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang “Kewajiban dan Cita-Cita Putri Indonesia” telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama. Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara, dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga. Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth I Rahayu 2017).

Situasi ini mendorong *Jurnal Perempuan* membuka ruang percakapan untuk mendiskusikan politik perempuan dalam menanggapi problem kebangsaan dan agensi perempuan dalam mentransformasi kebangsaan-Indonesia hingga dewasa ini. Ruang percakapan ini sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, karena konsep dan nilai kebangsaan kerap mengatasnamakan kepentingan perempuan. Meskipun yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya, dua puluh tahun reformasi justru diisi dengan munculnya peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas dan agama yang ironisnya dalam proses penyusunannya juga didukung dan/atau

diusung oleh partai politik nasionalis/sekuler. Pelabelan negatif terhadap kelompok yang dianggap berbeda masih sering terjadi, baik terhadap hal keyakinan atau aliran kepercayaan; orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender; maupun pilihan dan afiliasi politik. Tak jarang pelabelan negatif ini kemudian mengarah pada tindakan persekusi. Kondisi ini tentu tidak hanya mengancam kehidupan perempuan dan kelompok marginal, tetapi juga konsensus kebangsaan dan kehidupan demokrasi.

Para sarjana feminis mengkritik diabaikannya perempuan dan gender dalam kajian tentang kebangsaan. Mereka mengkaji nasionalisme/kebangsaan dengan dua pendekatan utama: pertama melalui pemeriksaan terhadap peran perempuan dalam gerakan kebangsaan, kedua lewat pengembangan teori dalam menganalisis cara-cara 'bangsa' didasarkan pada identitas dan makna gender tertentu (Ranchod-Nilsson & Tetreault 2000). Lebih jauh para feminis juga berfokus pada cara-cara perempuan bukan hanya menjadi simbol wacana kebangsaan dalam hal konstruksi bangsa dan gender, tetapi juga mampu merestrukturisasi proyek-proyek kebangsaan untuk memasukkan tujuan feminis (Vickers 2006 dikutip dalam Kaufman & Williams 2011).

Riset *Jurnal Perempuan* yang mengupas percakapan perempuan atau feminis tentang kebangsaan mengungkap bahwa perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan memiliki kepentingan yang "independen" terhadap kebangsaan. Namun demikian kepentingan perempuan tersebut dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Di sisi lain upaya mobilisasi dan politisasi perempuan juga digunakan untuk menolak ide kebangsaan dan menyebarkan gagasan radikal-fundamentalis seperti temuan kajian tentang pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Selain itu, artikel-artikel dalam edisi ini juga menunjukkan bahwa penulisan sejarah dan narasi perempuan terkait tema kebangsaan baik dalam bentuk kajian akademis maupun budaya populer (film) juga masih diwarnai adanya bias gender, kelas, ras, etnis, agama, dll. Untuk itu dibutuhkan pendekatan interseksional agar dapat menangkap dan memahami gagasan, jejak dan aktivitas perempuan dalam memaknai dan menghidupi konsep kebangsaan. Sementara itu sepanjang sejarah perjalanan kebangsaan dari awal munculnya gagasan kebangsaan hingga hari ini perempuan telah dan masih bergelut dan bekerja dalam aktivitas sehari-hari di ranah kewargaan untuk membangun masyarakat warga dan mereproduksi kebangsaan. **(Anita Dhewy)**